



*Asia Pacific Resources International Limited (APRIL)*

Perusahaan pulp terbesar Riau di tengah legalitas  
dipertanyakan, konflik sosial dan pemanasan global



Laporan Investigasi  
*Eyes on the Forest*

Dipublikasikan pada Desember 2012

*Eyes on the Forest* (EoF) adalah sebuah koalisi LSM lingkungan hidup di Riau, Sumatra: Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Alam Riau), WALHI Daerah Riau, dan WWF-Indonesia, Program Riau. EoF memantau status hutan alam yang tersisa di Propinsi Riau, Sumatra dan menyebarkan informasi ke seluruh dunia.

Untuk mendapatkan berita lebih lanjut mengenai *Eyes on the Forest*, kunjungi: <http://www.eyesontheforest.or.id>  
Email: [editor\(at\)eyesontheforest.or.id](mailto:editor(at)eyesontheforest.or.id)

## Sampul depan

Foto atas: Tumpukan kayu tropis campuran dari hasil penebangan hutan alam oleh PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), anak perusahaan penyuplai kayu bagi Asia Pacific Resources International Limited (APRIL). Foto diambil di Semenanjung Kampar di Riau oleh Eyes on the Forest dengan posisi N0°20'18.29" E102°46'5.88" pada 21 Februari 2012.

Foto kiri: Penebangan hutan alam oleh penyuplai kayu APRIL, PT. Triomas FDI, di Semenanjung Kampar. Foto diambil oleh Eyes on the Forest pada 30 Mei 2012.

Foto kanan: Pembukaan kanal gambut dan tumpukan kayu tropis campuran yang ditebangi dari hutan Semenanjung Kampar oleh penyuplai kayu APRIL dan anak perusahaannya, PT. RAPP. Sejumlah pohon ramin yang dilindungi CITES "diselamatkan" dan masih berdiri. Foto diambil oleh Eyes on the Forest pada posisi N°17'52.36" E102°43'22.29" pada 10 Februari 2012.

## Ringkasan

- Meskipun sudah berbisnis selama 17 tahun dan memiliki akses kepada konsesi-konsesi pemasok kayu pulp mencakup 10 persen daratan provinsi Riau (940.000 hektar), APRIL masih terus mengandalkan penebangan hutan alam untuk bisnis pulp hingga saat ini, di akhir tahun 2012. Komitmen publik APRIL untuk kelestarian dan menerapkan operasi bebas serat alam setelah 2009 hanyalah omongan pedagang; green-washing untuk memenangi kembali hati para pelanggan yang telah meninggalkan perusahaan karena catatan kelestariannya yang buruk. Apapun pernyataan soal kelestarian lingkungan yang dibuat oleh APRIL saat ini haruslah dilihat dengan tingkat skeptis setinggi mungkin dan seharusnya tidak diambil nilai nominalnya saja.
- Setidaknya 140.000 hektar hutan alam telah hilang di semua konsesi penyuplai APRIL antara 2008/2009 dan 27 persen dari total kehilangan hutan antara 2008/2009 dan 2011.
- APRIL diketahui telah menghancurkan kayu hutan alam dari konsesi-konsesi yang izinnya dikeluarkan lewat praktek korupsi. Sepuluh dari duabelas pemasok kayu APRIL yang beroperasi di kawasan utama pasokan kayu perusahaan, yakni di Semenanjung Kampar dengan gambut dalam, yang memperoleh izin-izin mereka dari bupati Siak dan bupati Pelalawan. Keduanya didakwa dalam kasus-kasus korupsi yang dahsyat dimana mereka mengeluarkan izin-izin dan saat ini dipenjara. Para pemasok APRIL juga menerima izin penebangan tahunan dari tiga Kepala Dinas Kehutanan Riau yang akhirnya dihukum penjara akibat korupsi oleh pengadilan tindak pidana korupsi.
- Para pemasok kayu APRIL diyakini telah menebangi hutan alam di dalam "Kawasan perlindungan nasional" yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008. Majalah TEMPO melaporkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup merencanakan gugatan terhadap 14 perusahaan, sebagiannya, enam perusahaan adalah pemasok kayu APRIL akibat dugaan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Sebelumnya, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum –yang sudah dibubarkan- memperkirakan bahwa 14 perusahaan digugat karena mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,067 triliun (217 milyar dolar AS).
- APRIL kehilangan sertifikat sementara dari FSC, Controlled Wood, akibat ketidakpatuhan pada 2010 setelah diaudit oleh Rainforest Alliance. Pemasok kayu APRIL, PT Sumatera Riang Lestari ditolak memperoleh sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada Mei 2011 oleh auditor PT Sarbi International Certification dan hanya menerima sertifikasi separuh bagi blok-blok konsesi pilihan setelah perusahaan itu mengajukan penilaian ulang dengan mengeluarkan dua blok yang gagal lulus verifikasi legalitas.
- Penebangan hutan rawa gambut dalam di Semenanjung Kampar dan pulau-pulau di pantai Riau telah menghasilkan konflik sosial sangat lama, meluas dan banyak diekspos media yang melibatkan masyarakat tempatan melawan perusahaan pemasok kayu APRIL termasuk kelompok korporat PT RAPP dan PT SRL. Isu-isu terfokus pada hilangnya kontrol terhadap hutan yang dimiliki masyarakat secara tradisional dan perusakan lahan dan sumber daya alam. Protes putus asa oleh masyarakat Pulau Padang yang menjahit mulut mereka pada Januari 2012 menghentikan operasi PT RAPP di konsesi mereka di

sana.

- Strategi pasokan kayu perusahaan APRIL tampaknya berdasarkan produksi di lahan gambut dimana 69 persen dari kawasan konsesinya terletak. Akselerasi APRIL pada pembukaan kanal gambut dan menghancurkan hutan gambut sepertinya mengakibatkan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca sangat lama dan tajam dari lansekap dan dengan demikian tampak seperti tamparan kepada wajah Presiden Indonesia dengan komitmen globalnya bagi pengurangan emisi yang menonjol.
- Sejak 2005, APRIL menjanjikan para pembelinya, investor dan masyarakat luas bahwa perusahaan akan melindungi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi. Kebanyakan dari hutan alam yang ditebangi oleh pemasok kayu APRIL sejak 2009 sepertinya termasuk dari Hutan Bernilai Konservasi Tinggi. Hutan-hutan ini merupakan habitat potensial bagi harimau dan gajah Sumatera yang sangat langka dan "sektor eko-flora" yang langka.
- APRIL tampaknya mempertimbangkan konversi jangkauan luas hutan tropis sebagai praktek bisnis mendasar: *"Ini terkait pada keterlibatan langsung atau tak langsung pada konversi signifikan hutan menjadi perkebunan, yang merupakan langkah mendasar bagi APRIL Indonesia dalam proses kami membangun pasokan serat perkebunan yang diperbarui.."*
- Eyes on the Forest mengimbau APRIL/RGE menghentikan penghancuran gambut dan penghancuran hutan alam dan tidak menambah kapasitas produksi pulp hingga pasokan kayu lestari telah diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen.
- Eyes on the Forest merekomendasikan bahwa pembeli APRIL dan mitra bisnis lainnya menghindari dikaitkan dengan penghancuran hutan tropis dan gambut oleh APRIL serta perusahaan bisnis terkait dengannya, dan tidak membiarkan diri mereka terjebak oleh kampanye *green-washing* oleh perusahaan itu.

## Pendahuluan:

### Bisnis seperti deforestasi dan penghancuran gambut biasa oleh APRIL

APRIL (*Asia Pacific Resources International Limited*<sup>1</sup>) dari grup *Royal Golden Eagle*<sup>2</sup> adalah satu perusahaan ingapura dengan pabrik pulp dan kertas di Indonesia dan Cina. Pada 2011, APRIL menganggap pabriknya di Riau, Sumatera adalah pabrik terbesar di dunia dengan produksi pulp sebesar 3,5 juta ton pada tahun 2011<sup>3</sup>. APRIL mulai memproduksi pulp secara komersial pada tahun 1995. APRIL berfokus pada penjualan bubuk kertas secara global tetapi juga mulai memproduksi kertas pada tahun 1998<sup>4</sup>. Produk unggulannya adalah "PaperOne" merek kertas kantor<sup>5</sup>. UPM-Kymmene<sup>6, 7</sup> dan Fuji Xerox<sup>8, 9</sup> merupakan beberapa dari pelanggan perusahaan yang paling menonjol sebelum mereka membatalkan kontrak mereka karena dipublikasikannya laporan atas perusakan hutan hujan tropis secara sembarangan oleh APRIL<sup>10</sup>.

Pada tahun 2004, APRIL mengiklankan secara global bahwa dirinya akan bebas dari kayu hutan alam pada tahun 2009: "Hingga tahun 2009 kami akan memiliki cukup akasia dari perkebunan kayu serat kami dan mitra kami untuk memproduksi 2 juta ton pulp yang merupakan kapasitas produksi pabrik kami."<sup>11</sup>

Namun, terlepas dari komitmen publik, *Eyes on the Forest*<sup>12, 13</sup> melaporkan pada 2010 bahwa pemasok kayu APRIL telah mengajukan dan menerima "izin-izin penebangan tahunan (RKT)" yang baru pada 2009 dan 2010. Izin-izin yang memperbolehkan pemasok APRIL untuk:

- Menebang masing-masing 74.099 dan 71.125 hektar hutan alam tropis. Angka-angka ini menunjukkan dahsyatnya kegiatan penggundulan hutan APRIL. Izin setiap tahunnya memperbolehkan perusahaan untuk konversi hutan jadi pulp di suatu wilayah hutan tropis yang ukurannya lebih besar daripada keseluruhan luas negara Singapura, tempat kegiatan APRIL bermarkas.
- Menebang hutan tropis dengan rata-rata panen kayu resmi masing-masing 118 dan 90 m<sup>3</sup>/ha. Panenan tersebut membuktikan bahwa APRIL tidak menebang lahan marginal tapi hutan alam yang bagus, yang apabila dilindungi dan diberi kesempatan untuk menepati lahan, memiliki potensi yang kuat untuk menyerap karbon.
- Memanen masing-masing 8,5 dan 6,3 juta m<sup>3</sup> kayu keras tropis campuran (MTH). Volume ini menunjukkan ketergantungan mutlak kegiatan APRIL pada penggundulan hutan hingga saat ini. Jumlah tersebut mewakili 84% dan 50% dari kebutuhan bahan baku pabrik APRIL di Riau, dengan asumsi bahwa pabrik masih memproduksi dua juta ton pulp per tahun pada saat itu.

Tahun 2010 juga merupakan tahun ketika *Rainforest Alliance* membatalkan sertifikat "Kayu Terkontrol FSC" APRIL untuk sementara atas ketidakpatuhan APRIL dan saat APRIL memilih untuk tidak melanjutkan lagi proses itu bahkan terus membuka lahan gambut dan menebangi HCVF potensial tanpa penilaian yang tepat pada tempatnya<sup>14, 15, 16</sup>.

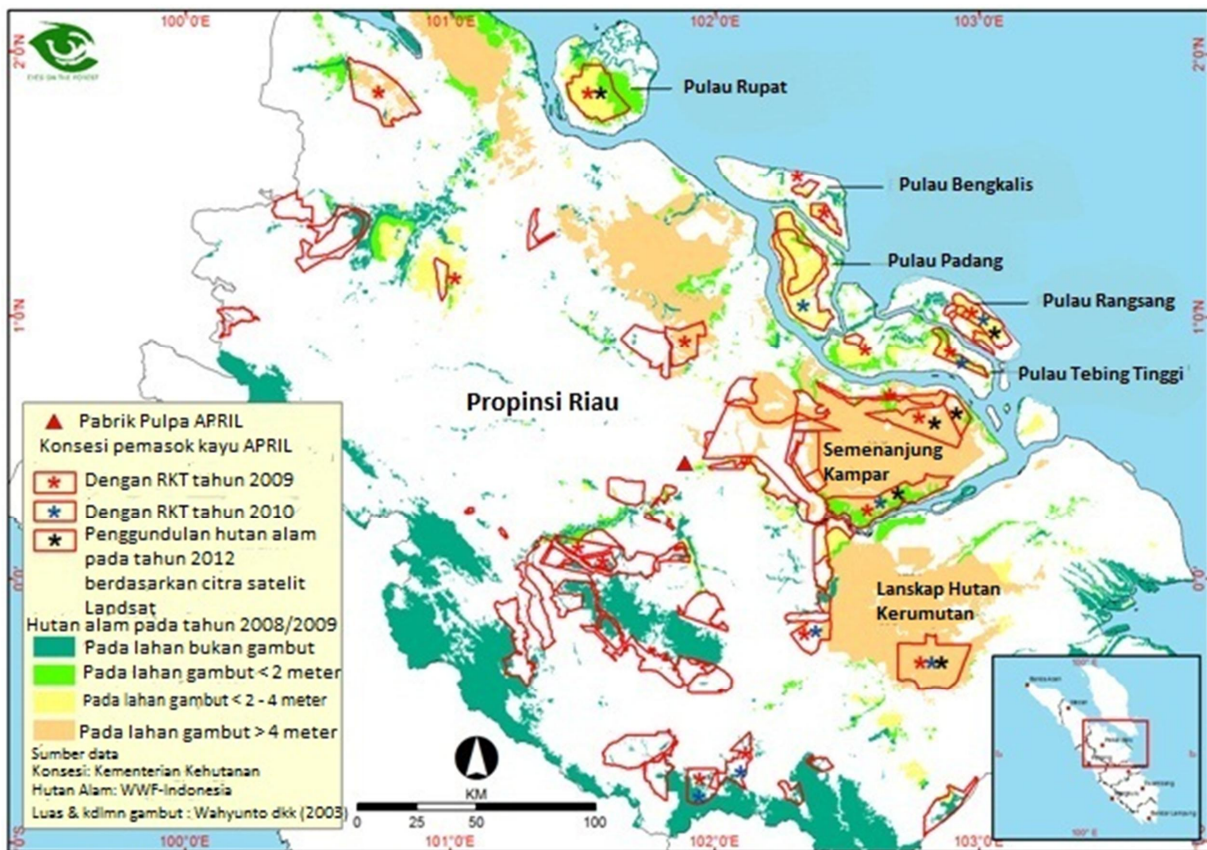
Meskipun sekarang ini telah berbisnis selama 17 tahun dan memiliki akses ke konsesi pasokan kayu pulp yang mencakup lebih dari 10 persen luas daratan provinsi Riau (940.000 hektar), APRIL terus mengandalkan pada penebangan hutan alam bagi bisnis pulpanya. Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF, Kelompok Kerja Keuangan Kehutanan Indonesia) melaporkan bahwa APRIL dan pesaingnya Asia Pulp & Paper (APP) menghancurkan lebih banyak kayu hutan alam daripada serat perkebunan yang mereka

tanam di provinsi Riau akhir 2011<sup>17</sup>. Hal ini berarti komitmen publik APRIL untuk kegiatan lestari yang bebas dari serat alami setelah 2009 hanyalah omongan penjual, green-washing untuk memenangi kembali hati para pelanggan yang telah meninggalkan perusahaan karena catatan kelestariannya yang buruk dan pelanggan yang pada umumnya telah menghindari produk kertas Indonesia untuk alasan yang sama. Setiap pernyataan atas pelestarian lingkungan yang dibuat oleh APRIL saat ini harus dipandang dengan tingkat skeptis setinggi mungkin dan tidak boleh diambil nilai nominalnya saja<sup>18</sup>.

## Investigasi Eyes on the Forest soal operasi APRIL

Di tengah laporan konflik sosial dan penebangan hutan lahan gambut dalam yang berlanjut, yang dianggap terlarang oleh instansi pemerintah, Eyes on the Forest memutuskan untuk memperbaharui status kegiatan APRIL di Riau sejak tahun 2009. Eyes on the Forest menganalisa informasi izin penebangan tahunan, hasil-hasil investigasi lapangan, dan informasi tutupan hutan berdasarkan citra satelit yang diambil antara 2009 dan November 2012 (Peta 1).

Berdasarkan analisa citra satelit, setidaknya 140.000 hektar hutan alam telah hilang di semua konsesi pemasok APRIL antara 2008/2009 (berdasarkan pada mozaik citra Landsat yang diperoleh pada 2008 dan 2009) dan 2011 di Riau (Peta 1). Angka ini mendekati total luas kawasan hutan alam yang mendapat izin penebangan tahunan (Rencana Kerja Tahunan/RKT) yang diterbitkan pada 2009 dan 2010 yang diperbolehkan untuk ditebangi.



Peta 1. Konsesi-konsesi pemasok kayu APRIL di provinsi Riau dan hilangnya hutan antara 2008/2009 dan 2011. Konsesi-konsesi yang ditandai dengan batas merah dan tanda bintang (\*) terus menebangi hutan alam setelah 2009 berdasarkan izin penebangan tahunan (RKT) dan analisis citra satelit. Kedalaman gambut di kawasan yang gundul selama masa kajian ditandai dengan warna (lihat Bab 4).

*Eyes on the Forest* menemukan sejumlah masalah dasar yang sama diulang di banyak kawasan yang hutannya ditebangi dan kemudian laporan ini menyusun sebagai berikut:

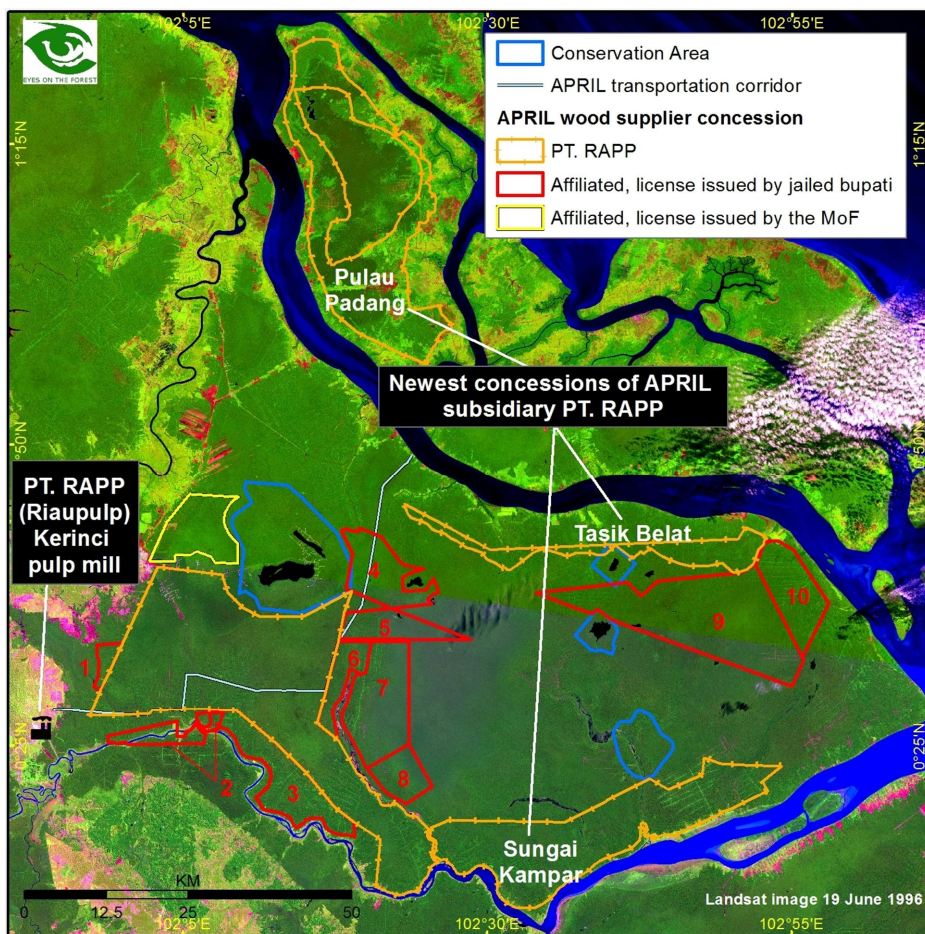
1. Penebangan hutan di kawasan dengan izin konsesi yang dipertanyakan legalitasnya, termasuk yang diperoleh dari pejabat yang didakwa atau disidang karena kasus korupsi.
2. Penebangan hutan yang merupakan pelanggaran peraturan pemerintah soal rencana tata ruang dan di dalam "kawasan moratorium deforestasi" Indonesia.
3. Penebangan hutan yang menyebabkan konflik sosial yang berlangsung lama.
4. Model bisnis berdasarkan emisi gas rumah kaca dari pembukaan gambut yang berlanjut.
5. Perusakan Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCVF).

Sebagian besar dari kasus yang diidentifikasi dalam kegiatan pada dua pemasok terbesar APRIL, perusahaan unggulan yang telah lama didirikan, yakni PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) dan yang relatif baru PT. Sumatera Riang Lestari (SRL), yang menurut dugaan dipegang oleh pendiri dan pemimpin APRIL Sukanto Tanoto<sup>19, 20</sup>. Kedua perusahaan tersebut diizinkan untuk memanen 54% dan 85% dari total kayu keras tropis campuran (MTH) APRIL yang diperbolehkan untuk diolah oleh izin penebangan tahunan 2009 dan 2010.

# 1. Penebangan hutan di kawasan-kawasan dengan izin konsesi yang dipertanyakan keabsahannya, termasuk mereka yang diperoleh dari pejabat-pejabat terdakwa dan disidang karena kasus korupsi

Semenanjung Kampar seluas 700.000 hektar di bagian timur-laut Riau (Peta 1) memiliki salah satu konsentrasi terbesar hutan dan karbon gambut di dunia dan perlindungannya sangat penting bagi Indonesia untuk dapat memenuhi komitmen publik soal tujuan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)<sup>21, 22</sup>. Kampar dianggap sebagai daerah konservasi utama oleh banyak LSM dan Pemerintah Indonesia<sup>23, 24, 25, 26, 27, 28, 29</sup>.

Disamping nilai pentingnya, APRIL memilih Semenanjung Kampar sebagai wilayah pasokan kayu utamanya karena kedekatannya dengan pabrik besar pulp PT. RAPP, yang juga dikenal sebagai "Riaupulp" (Peta 1). Selama bertahun-tahun, PT. RAPP, anak perusahaan APRIL, dan sebelas pemasok kayu afiliasinya mengajukan izin konsesi untuk lebih dari sepertiga luas Kampar yang hampir seluruhnya ditutupi hutan tropis lebat, akhirnya memperoleh izin (Peta 2), dan kemudian menebangi daerah hutan tersebut untuk memasok kayu alam campuran ke pabrik Riaupulp. Untuk mengangkut kayu gelondongan ke pabriknya dan untuk mengangkut pulpnya ke pelabuhan, APRIL juga membangun jalan *logging* yang merusak secara ekologis yang membelah ekosistem gambut di Semenanjung Kampar menjadi terbelah dua<sup>30</sup>.



Peta 2. Konsesi-konsesi pemasok APRIL di Semenanjung Kampar. Konsesi-konsesi anak perusahaan APRIL, PT. RAPP, ditunjukkan dengan batas oranye (termasuk satu blok di Pulau Padang di luar semenanjung), konsesi-konsesi sepuluh pemasok terafiliasi yang memperoleh izin dari dua bupati yang telah dipenjarakan ditunjukkan dengan batas merah, sebuah konsesi tambahan pemasok terafiliasi ditunjukkan dengan batas kuning.

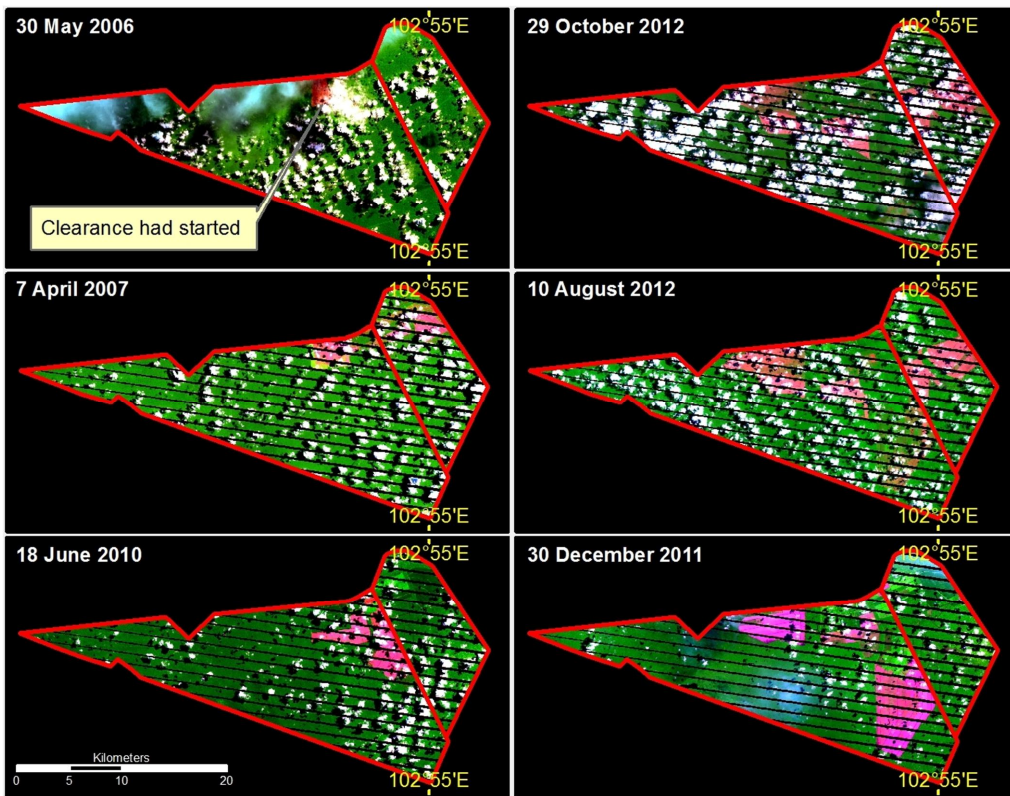
Selain di Kampar, sejak tahun 2009 APRIL telah mengeruk kayu alam (MTH) dalam volume besar dari hutan gambut dalam di Kerumutan dan dari pulau-pulau di pesisir Kabupaten Meranti Riau, yang sampai saat itu sudah terselamatkan dari penebangan hutan oleh industri kertas (Peta 1).

Izin-izin yang mendasari para pemasok kayu APRIL yang menebangi lahan gambut dalam di Kampar, Kerumutan dan kepulauan Meranti tampaknya sangat dipertanyakan karena serangkaian penyimpangan, yaitu:

- APRIL sengaja melumat kayu hutan alam dari konsesi yang izinnya diterbitkan melalui praktek korupsi.

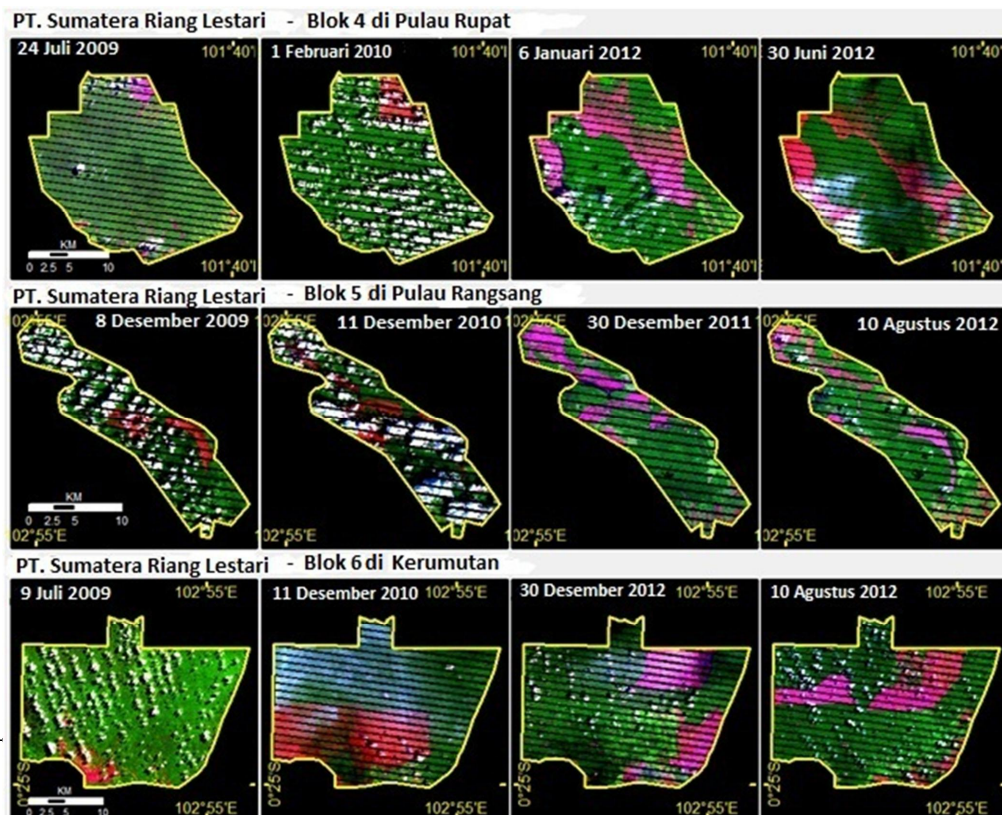
Sepuluh dari dua belas pemasok kayu APRIL di Kampar memperoleh izin mereka pada tahun 2002 dan dan 2003 dari Bupati Siak dan Bupati Pelalawan, otoritas yang mengatur Semenanjung Kampar. Kedua pejabat pemerintah tersebut telah divonis dalam kasus berprofil tinggi atas praktek-praktek korupsi dalam penerbitan izin tersebut dan saat ini sedang dipenjara (konsesi-konsesi bernomor merah dengan batas merah di Peta)<sup>31</sup>. Sebagian dari pemasok juga menerima izin penebangan tahunan dari tiga Kepala Dinas Kehutanan yang sudah dihukum penjara akibat terbukti melakukan korupsi<sup>32, 33</sup>.

Citra-citra satelit menunjukkan bahwa pemasok-pemasok APRIL, PT. Uniseraya dan PT. Triomas FDI (nomor 9 dan 10 di Peta 2), menggunduli hutan di konsesi mereka hingga akhir 2012 (Peta 3). Pada lanskap Kerumutan yang berdekatan, lima dari tujuh pemasok juga menerima izin mereka dari Bupati Pelalawan yang sedang dipenjara dan memasok kayu hutan alam ke APRIL. Satu pemasok tambahan (PT. Mitra Kembang Selaras) menerima izin dari Bupati Indragiri Hulu kabupaten yang pernah diperiksa oleh penyidik KPK tiga tahun silam atas tuduhan praktek korupsi serupa. Perusahaan ini terus menebangi hutan alam di daerah tersebut hingga akhir 2010<sup>34</sup>.



Peta 3. Citra satelit Landsat antara tahun 2006 dan 2012 menunjukkan penebangan hutan alam oleh dua pemasok terafiliasi (9. PT. Uniseraya and 10. Triomas FDI) yang menerima izin-izin dari mantan bupati Pelalawan yang dihukum penjara, Tengku Azmun Jaafar.

- Pemasok kayu APRIL, PT. SRL menerima izin konsesi yang dipertanyakan keabsahannya. Beberapa laporan investigasi yang diterbitkan oleh *Eyes on the Forest* mendukung bahwa izin PT SRL meragukan<sup>35, 36, 37, 38, 39</sup>. Namun, terlepas dari penyimpangan tersebut, PT. SRL tampaknya telah menyelesaikan sebagian besar dari penebangan hutan yang direncanakan di dalam konsesinya (Peta 4).

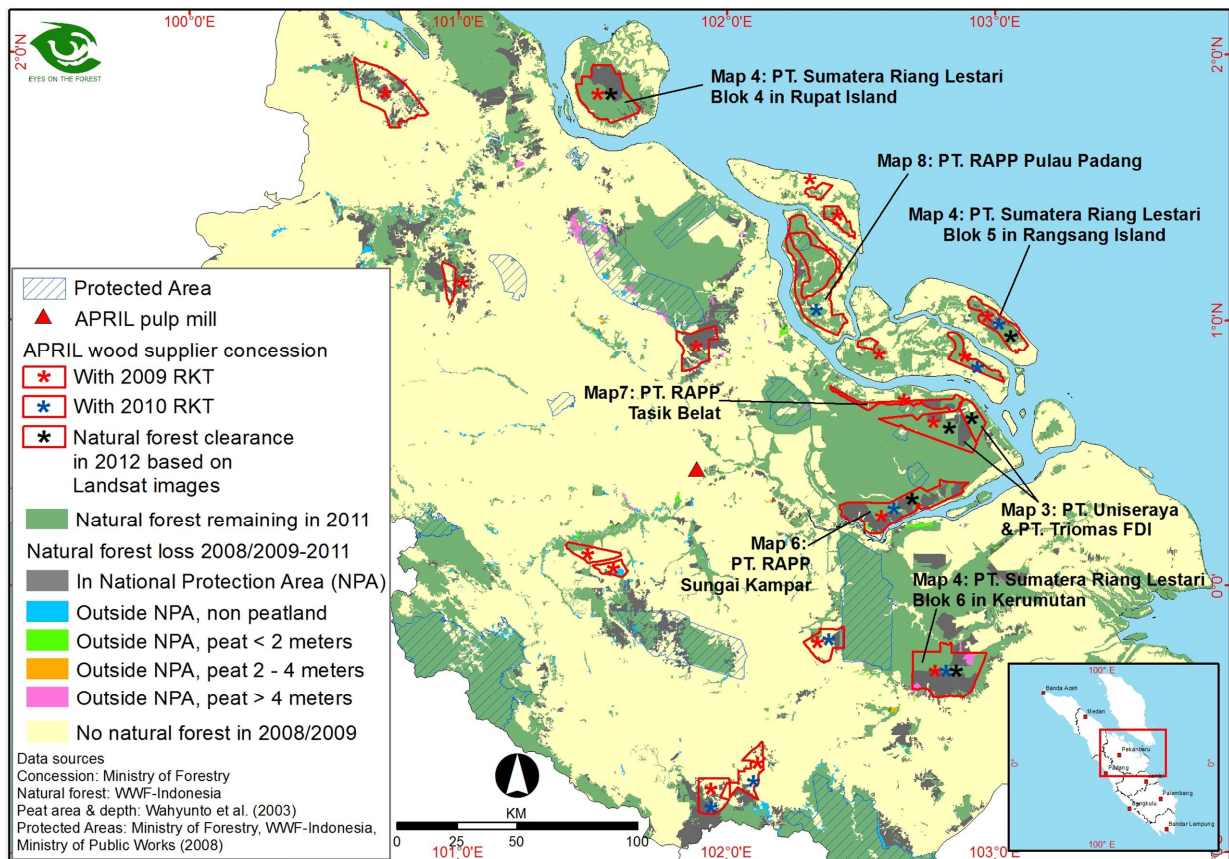


Peta 4. Penebangan hutan alam oleh PT. Sumatera Riang Lestari, pemasok terbesar kedua APRIL saat ini.

## 2. Penebangan hutan merupakan pelanggaran peraturan Pemerintah soal rencana tata ruang dan di dalam "kawasan moratorium deforestasi" Indonesia

Berdasarkan analisis data tutupan hutan WWF-Indonesia, data luas/kedalaman gambut oleh Wahyunto *et al.* (2003), Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan citra satelit Landsat yang diambil antara 2009 hingga 2012 (Peta 1, 8), *Eyes on the Forest* menemukan bahwa para pemasok kayu APRIL menebangi hutan alam:

- Di dalam "Kawasan Hutan Lindung Nasional" yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional<sup>i</sup>. [Berlaku untuk sebagian besar hutan alam yang ditebang oleh para pemasok APRIL sejak 2009, termasuk dua pemasok terbesar APRIL, PT SRL (Peta 4), PT. RAPP (Peta 6,7,8).
- Di dalam "kawasan moratorium" melanggar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/Menhut-II/2011, tertanggal 17 Juni 2011 tentang "Penetapan Peta Indikatif tentang Penangguhan Pemberian Izin Baru untuk Pemanfaatan Hutan, Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Konversi Kawasan Hutan dan Penggunaan Lain"<sup>40, 41</sup>. Hutan alam pada konsesi Pulau Rupa milik PT. Sumatera Riang Lestari ditebang pada tahun 2011 (Peta 4).



<sup>i</sup> Peraturan ini menetapkan bahwa lahan gambut dengan kedalaman gambut 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai atau rawa dianggap sebagai "Kawasan Hutan Lindung Nasional."

Peta 5. Antara tahun 2009 dan 2012, pemasok-pemasok kayu APRIL yang ditunjukkan disini menebangi hutan alam di dalam "Kawasan Lindungan Nasional" yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008. Untuk kekhususan dalam kawasan dan perluasan penebangan hutan alam di konsesi-konsesi kunci, lihat peta detil yang dirujuk. Tiga dari konsesi yang disorot adalah termasuk dari "14 besar" pemasok APRIL dan APP yang oleh Kementerian Kehutanan sedang mempersiapkan untuk gugatan.

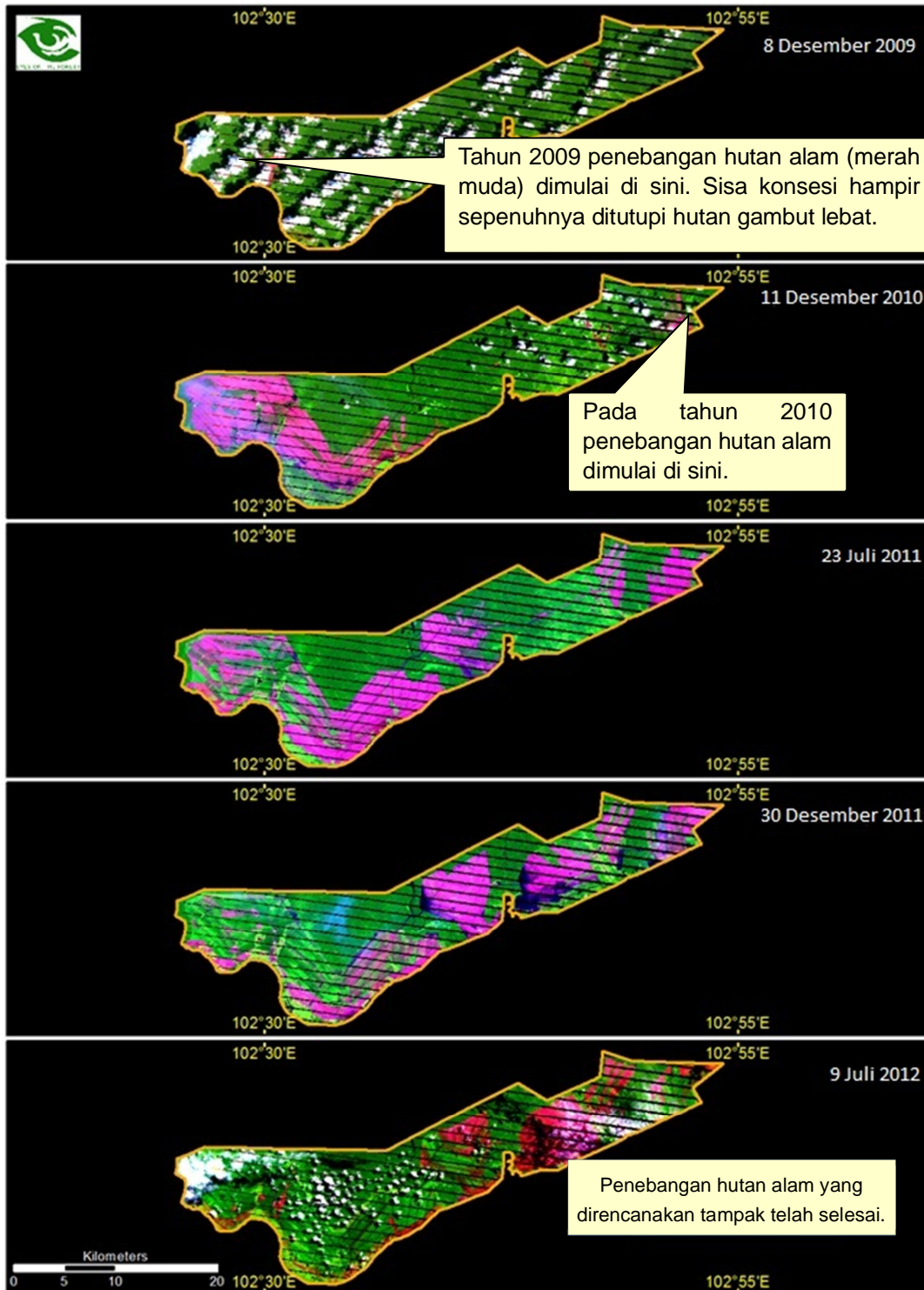
Berdasarkan informasi yang diterbitkan oleh majalah TEMPO di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia berencana mengajukan gugatan perdata terhadap 14 perusahaan yang diduga melakukan perusakan lingkungan hidup, yang diperkirakan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum telah merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah (US\$ 225 miliar)<sup>42, 43</sup>. Enam pemasok kayu APRIL termasuk dalam 14 perusahaan tersebut: tiga pemasok yang telah selesai menebangi hutan pada tahun 2009<sup>ii</sup> dan tiga pemasok yang terus menebangi hutan alam setelah tahun 2009<sup>iii</sup> (Peta 5).

PT. Sumatera Riang Lestari mencoba untuk mendapatkan sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK/*Timber Legality Verification System*) untuk sekitar 220.000 hektar lahan di Riau dan Sumatera Utara. Namun, pada bulan Mei 2011, auditor (PT. Sarbi International Certification) memutuskan untuk tidak memberikannya karena perusahaan tidak mematuhi undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan hutan lestari dan masalah-masalah sosial<sup>44, 45</sup>. Pemasok APRIL kemudian mengajukan penilaian ulang dengan mengeluarkan blok-blok yang tidak lulus verifikasi legalitas. Auditor menerbitkan sertifikat SVLK untuk blok-blok tersisa<sup>46, 47</sup>. Eyes on the Forest kemudian menyimpulkan bahwa produksi pulp APRIL berkemungkinan dicemari agaknya dengan pasokan ilegal, pasokan dimana sistem sertifikasi legalitas resmi Pemerintah Indonesia pun menolak menerbitkan satu sertifikatnya.

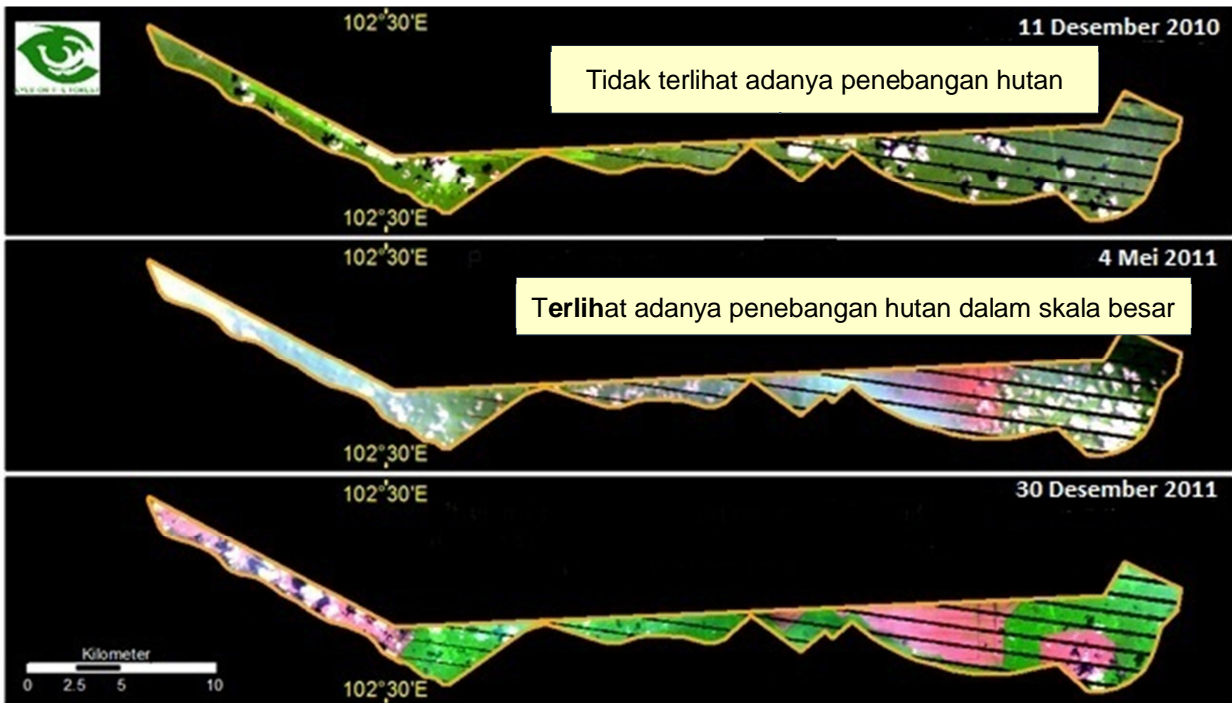
---

<sup>ii</sup> PT. Madukoro, PT. Merbau Pelalawan Lestari dan PT. Nusa Prima Manunggal

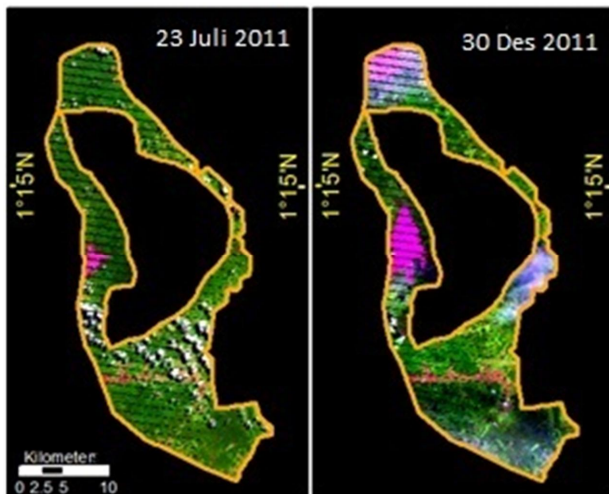
<sup>iii</sup> PT. Mitra Kembang Selaras, PT. Citra Sumber Sejahtera dan PT. Bukit Batabuh Sei Indah



Peta 6. Citra satelit Landsat hingga 2012 menunjukkan penebangan hutan alam oleh PT. RAPP di Blok Sungai Kampar. Pada prinsipnya, hijau tua menunjukkan hutan alam, merah muda menunjukkan lahan setelah mengalami penggundulan hutan, hijau muda menunjukkan perkebunan, putih menunjukkan awan.



Peta 7. Citra Satelit Landsat menunjukkan penebangan hutan alam oleh PT. RAPP di blok Tasik Belat.



Peta 8. Penebangan hutan alam oleh PT. RAPP di Pulau Padang. Perusahaan tampaknya telah berhenti menebangi hutan untuk saat ini, tidak ada kegiatan penggundulan hutan baru terdeteksi pada citra satelit yang diambil setelah tanggal 30 Desember 2011. Konflik sosial yang parah dengan penduduk setempat atas kegiatan penggundulan hutan APRIL di pulau ini telah dilaporkan secara luas di media (lihat Bab 3)

## 1. Penebangan hutan yang menyebabkan konflik sosial yang berlangsung lama

Penebangan yang hutan rawa gambut dalam di Semenanjung Kampar Riau dan pulau-pulau di pesisir Riau telah menimbulkan konflik sosial dengan cakupan yang luas dan berlangsung lama antara masyarakat lokal dan LSM dengan para pemasok kayu APRIL, termasuk andalan perusahaan PT. RAPP dan PT. Sumatera Riang Lestari (SRL). Masalah-masalah yang serupa meliputi, kehilangan kontrol atas hutan dan lahan yang masih dimiliki secara tradisional dan penurunan kualitas sumber daya alam. Masyarakat dan LSM juga mengkhawatirkan tentang penurunan lahan gambut dan banjir yang akan melanda tanaman serta intrusi air laut akibat kegiatan perusahaan<sup>48, 49</sup>.

Pada Lampiran 1, *Eyes on the Forest* mencatat banyak tindakan utama yang dilakukan oleh berbagai masyarakat dan LSM sejak tahun 2009 terhadap pemerintah yang mengeluarkan izin dan kepada para pemasok APRIL yang terus melakukan penebangan hutan alam dan pengurusan lahan gambut. Sebuah protes keputus-asaan dengan menjahit mulut dilakukan oleh penduduk Pulau Padang pada Januari 2012 (foto 1) berhasil menghentikan kegiatan PT. RAPP di konsesi tersebut sejak saat itu. Pada konsesi lain, PT. RAPP dan PT. SRL melanjutkan kegiatannya dan masyarakat melanjutkan protesnya.



Foto 1. Warga Pulau Padang menggelar demonstrasi dengan menjahit mulut untuk memprotes kegiatan PT. RAPP yang beroperasi di pulau mereka, Desember 2011. Foto oleh *Tribunnews.com*<sup>50</sup>.



Foto 2. Masyarakat Teluk Meranti memprotes kegiatan PT. RAPP, spanduk kuning berbunyi "cabut izin HTI (hutan tanaman industri) RAPP ". Tiga foto di bagian kiri depan adalah Direktur APRIL Sukanto Tanoto, Presiden Yudhoyono dan MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan yang mengeluarkan izin pada tahun 2009<sup>51</sup>.

## 1. Model bisnis menghasilkan emisi GRK dari praktek pembukaan lahan gambut yang terus berlanjut

Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya (Green-House Gas/GHG) antara 26 dan bahkan 41% pada tahun 2020 yang berfokus pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta lahan gambut tropis<sup>52</sup>. Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia dan Norwegia menandatangani Surat Pernyataan Kehendak (*Letter of Intent*) untuk membentuk kemitraan "untuk berkontribusi bagi pengurangan yang signifikan dari emisi gas rumah kaca dari deforestasi hutan, degradasi hutan dan konversi lahan gambut"<sup>53, 54</sup>. Di Indonesia, satuan tugas REDD+ memilih Riau, Sumatera - provinsi dengan emisi gas rumah kaca tertinggi di negara ini<sup>55</sup> - sebagai salah satu kandidat untuk menjadi provinsi percontohan REDD+ di bawah perjanjian Indonesia-Norwegia.

Pembukaan gambut skala besar, penebangan hutan alam dan pengelolaan perkebunan di lahan gambut menyebabkan emisi CO<sub>2</sub> yang besar, takterbalikkan secara terus-menerus yang pada akhirnya mengarah pada runtuhnya ekosistem gambut secara keseluruhan dan menghentikan semua kegiatan, membuat produksi kayu pulp pada tanah gambut menjadi tidak lestari<sup>56, 57, 58</sup>. WWF-Indonesia memperkirakan bahwa pencapaian emisi "nol" sebesar 1,7 juta hektar lahan gambut dalam di Kampar dan lansekap Kerumutan yang berdekatan, di Riau, yang mungkin dapat berkontribusi lebih dari 50 persen dari tujuan menuju 26 persen pengurangan emisi Indonesia<sup>59</sup>.

Namun, strategi perusahaan pemasok kayu APRIL didasarkan pada produksi pada lahan gambut di mana 69% wilayah konsesinya berada. Percepatan pembukaan lahan gambut APRIL dan penghancuran hutan gambut di Kampar dan Kerumutan pada tahun 2009 (Peta 1) sepertinya yang sangat meningkatkan emisi gas rumah kaca lanskap jangka panjang yang muncul seperti tamparan di wajah Presiden atas komitmen global Indonesia untuk pengurangan emisi secara dramatis.

Hal ini menempatkan semua klaim pelestarian dari anak perusahaan menjadi pertanyaan yang sangat serius. Sangat menarik untuk dicatat bahwa sebuah perusahaan dengan seperti model utama bisnisnya yang tidak lestari secara prinsip bisa terpilih sebagai anggota World Business Council on Sustainable Development (Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Lestari)<sup>60</sup>.

## 2. Perusakan Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value Forests/HCVF*)

Sejak tahun 2005, APRIL telah berjanji kepada para pembeli, investor dan masyarakat umum bahwa perusahaan akan melindungi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value Forests/HCVF*) setelah mereka secara profesional dan independen diidentifikasi telah mengikuti *HCVF Toolkit* untuk Indonesia yang didorong oleh para pemangku kepentingan<sup>61</sup>.

Untuk mengimplementasikan janji tersebut, para pemasok APRIL harus menjalani penilaian Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Values/HCV*) dari komisi independen untuk melakukan konsultasi multipihak dengan para pemangku kepentingan untuk pengesahan temuan dan "rencana penebangan hutan"- sebelum membangun infrastruktur, pembukaan lahan gambut dan penebangan pohon<sup>62</sup>. Perusahaan tidak melakukan hal ini padahal diwajibkan.

Sebaliknya perusahaan berfokus pada kampanye hubungan masyarakat mencoba untuk melakukan *greenwash* pada kegiatan penggundulan hutan berskala besar mereka. Sebagai contoh, sampai penulisan laporan ini, APRIL melaporkan pada halaman web bahwa dirinya bekerja sama dengan WWF dalam penilaian HCV-nya<sup>63</sup>. Hal ini tidak benar. WWF telah terus-menerus mengkritik APRIL atas penggundulan hutan sembarangannya<sup>64</sup>. Pada saat APRIL melakukan apa yang disebutnya sebagai penilaian HCVF tanpa konsultasi dengan pemangku kepentingan di 13 konsesi<sup>iv</sup> pada tahun 2006 untuk membenarkan penebangan hutan yang berlanjut, WWF membantah deliniasi "HCVF" perusahaan dan keberatan dengan penebangan hutan alam yang diyakini WWF merupakan HCVF. Tapi bukannya terlibat dalam dialog multipihak dengan para pemangku kepentingan, para pemasok APRIL malah melanjutkan penebangan hutan mereka, bahkan menebang beberapa blok "HCVF" yang diidentifikasi sendiri oleh perusahaan<sup>65</sup>.

Praktek-praktek tersebut berlanjut hingga saat ini

Untuk mendapatkan sertifikat Kayu Terkontrol FSC, APRIL, pada bulan Agustus 2008, telah menandatangani kontrak dengan *Rainforest Alliance's SmartWood Program* (RA / SW) yang mencakup ketentuan untuk tidak menebang semua hutan alam dimana tidak ada penilaian HCVF profesional dilakukan atau dimana deliniasi HCVF perusahaan ditentang oleh para pemangku kepentingan<sup>66</sup>. Pada bulan Desember 2008, Divisi

---

<sup>iv</sup> PT. Bina Daya Bintara, PT. Rimba Mutiara Permai, PT. Mitra Taninusa Sejati, PT. Bukit Raya Pelalawan, PT. Merbau Pelalawan Lestari, PT. Mitra Kembang Selaras, PT. Madukoro, PT. Harapan Jaya, PT. Bukit Batabu Sei Indah, PT. Citra Sumber Sejahtera, PT. Uniseraya dan PT. Triomas FDI.

Kehutanan PT RAPP APRIL menerima sertifikat Kayu Terkontrol FSC interim untuk fasilitas manufaktur mereka dan sebagian perkebunan serat mereka yang sudah ada. Namun, pada bulan April 2010, *Rainforest Alliance* menghentikan sertifikat interim tersebut<sup>67</sup>. Keputusan tersebut didasarkan pada audit RA/SW tahun 2009 yang menemukan ketidaksesuaian kegiatan April dengan persyaratan Kayu Terkontrol FSC, serta dengan ketentuan-ketentuan kontrak lainnya yang telah disepakati<sup>68</sup>. RA/SW memberikan dua tenggat waktu bagi APRIL untuk kembali memulai aktivitas audit Kayu Terkontrol FSC dan HCVF yang diperlukan untuk memulihkan sertifikat FSC CW<sup>69</sup>. Namun, APRIL memilih untuk melewatkan kedua tenggat waktu tersebut.

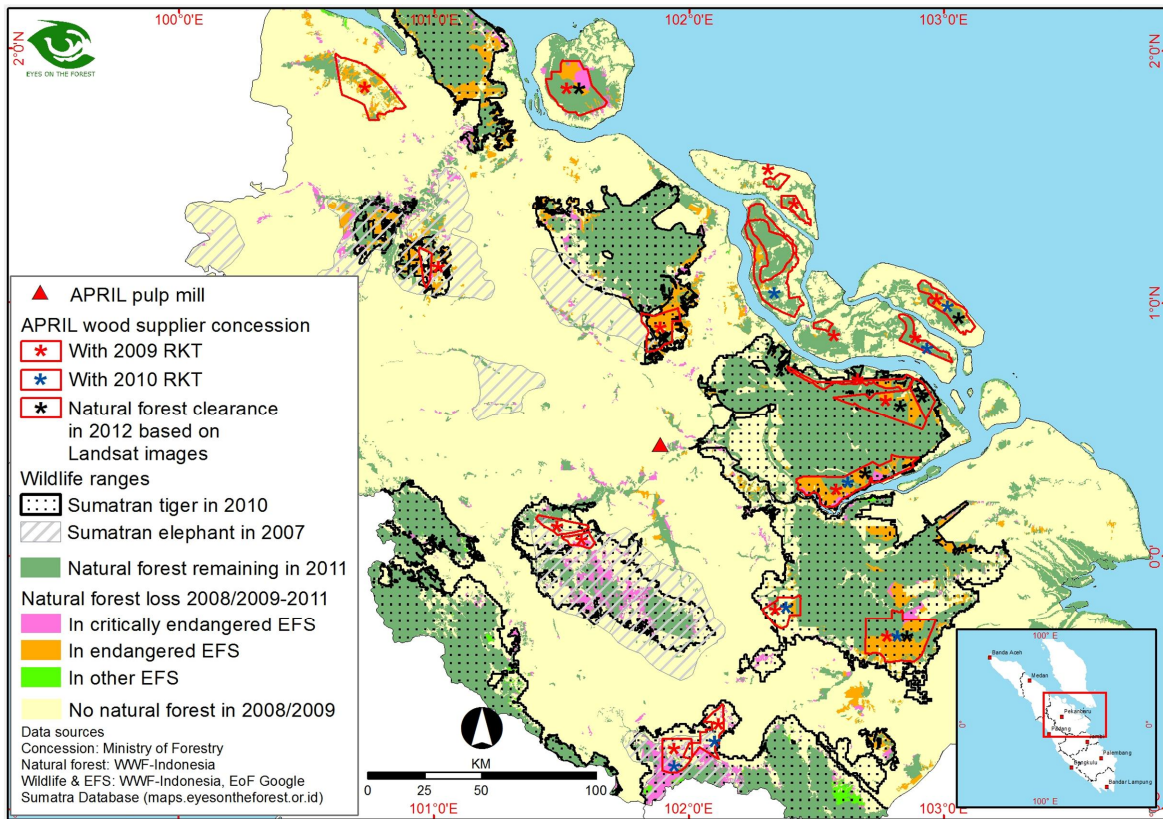
Komentar APRIL atas suspensi perusahaan mengakui dua fakta penting: (1) Interpretasi perusahaan APRIL sendiri atas HCVF tidak ada dalam kesepakatan dengan asesor FSC resmi RA/SW: "Penghentian *terutama terkait dengan kedua organisasi yang tidak mampu untuk menyetujui pemahaman umum akan definisi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi...* ", dan (2) APRIL menganggap konversi hutan tropis yang membentang lebar sebagai praktik bisnis yang penting: "*Hal ini terkait dengan keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam konversi yang signifikan dari hutan menjadi perkebunan, yang merupakan langkah penting untuk APRIL Indonesia dalam proses kami dalam membangun pasokan serat tanaman lestari...*"<sup>70</sup>

LSM Belanda Tropenbos, yang dikontrak oleh APRIL untuk melakukan penilaian HCV di Semenanjung Kampar, menyatakan pada konsultasi publik Mei 2010 bahwa semua hutan alam di Kampar adalah HCVF<sup>71</sup> tapi kemudian melanjutkan untuk merekomendasikan bahwa perusahaan dapat menebang sebagian besar dari hutan tersebut. PT. RAPP hampir selesai menebangi konsesinya di Tasik Belat dan Sungai Kampar di Kampar (Peta 3, 4) di mana, menurut *Forest Peoples Program*, "*hanya proses penilaian HCV yang terpotong dan sangat awal yang telah dilakukan oleh Tropenbos kesimpulan yang telah dipersengketakan oleh masyarakat*"<sup>72</sup>. Jaringan LSM setempat Jikalahari dan *Greenpeace* mengomentari laporan HCVF Tropenbos bahwa "*penilaian Tropenbos ini berfungsi untuk mencoba dan melegitimasi konversi yang sedang berlangsung pada jumlah besar hutan di Kampar, sementara menyisihkan bidang lahan minimal 'HCV'*"<sup>73</sup>. Tampaknya masyarakat sipil Indonesia merasa bahwa Tropenbos telah menjadi wali APRIL untuk menjadi cap stempel mengesahkan pembukaan dan penggundulan hutan lahan gambutnya.

Sebagian besar hutan alam yang ditebang oleh pemasok kayu APRIL sejak 2009 kemungkinan dianggap sebagai Hutan Bernilai Konservasi Tinggi menurut berbagai pihak pemangku kepentingan yang didukung *Toolkit*<sup>74</sup>:

- Hutan-hutan berada di atas lahan gambut dalam dan pada "Kawasan Hutan Lindung" yang dilindungi oleh pemerintah (Nilai Konservasi Tinggi [HCV] 1.1 dan HCV 3 dan HCV 4.1 (Peta 5).
- Hutan-hutan merupakan habitat potensial bagi harimau Sumatera yang sangat terancam punah (HCV 1.2), dan "sektor eko-floristik" yang sangat terancam punah dan terancam punah (HCV 3)<sup>75, 76</sup> (Peta 9).

Namun, meskipun penerbitan kebijakan perlindungan HCVF perusahaan pada tahun 2005, penerbitan sertifikat interim FSC CW pada tahun 2008, lepasnya sertifikat dan sampai dengan tanggal laporan ini, PT. RAPP, PT. SRL dan para pemasok kayu lainnya telah terus menebangi lahan gambut dalam dan hutan lainnya tanpa penilaian HCV yang didukung oleh para pemangku kepentingan. Bahkan, pada tahun 2009, tahun di mana APRIL telah berkomitmen untuk bebas dari MTH, tampaknya merupakan awal dari serangan habis-habisan terhadap hutan gambut Sumatra yang paling berharga dan juga terhadap iklim global. Yang tersisa adalah laporan lama yang tertinggal untuk ditampilkan pada halaman web perusahaan dan arsip di internet, yang terus mencoba dan melakukan *greenwash* atas kegiatan APRIL.



Peta 9. Dampak pembukaan lahan gambut dan deforestasi oleh para pemasok kayu APRIL di habitat potensial harimau dan gajah Sumatera, serta di "sektor eko-floristik" yang sangat terancam punah dan terancam punah.



Foto 3. Konsesi PT. RAPP di Sungai Kampar di mana hutan alam ditebangi. Beberapa pohon Ramin yang tersisa "diselamatkan" meskipun kelangsungan hidupnya dipertanyakan. Sebuah foto udara oleh EoF pada tanggal 30 Mei 2012

## Rekomendasi *Eyes on the Forest* kepada APRIL

*Eyes on the Forest* menghimbau APRIL/RGE dan para pemasok kayunya untuk melaksanakan hal-hal berikut ini:

- 1) APRIL dan para pemasok kayunya tidak akan membangun atau memulai beroperasi atau berasosiasi dengan fasilitas manufaktur pulp apa pun (baik baru, maupun dengan kapasitas yang diperluas dengan cara apapun, misalnya melalui *de-bottlenecking*) tanpa pihak ketiga independen, yang dapat diterima baik oleh APRIL maupun masyarakat sipil termasuk *Eyes on the Forest*, telah memverifikasi APRIL memiliki kesempatan dan rencana operasional yang layak untuk menghidupi pabrik dengan pasokan kayu berbasis perkebunan lestari yang tumbuh tanpa menggantikan hutan alam dan pembukaan atau pengaliran lahan gambut.
- 2) Paling lambat setelah 1 Juli 2013, tidak ada pabrik yang telah ada atau yang akan datang yang terkait dengan APRIL akan menerima:
  - a. semua jenis serat hutan alam yang dipanen dari tanah gambut dengan kedalaman apapun;
  - b. setiap serat hutan alam dari hutan bernilai konservasi tinggi sebagaimana didefinisikan dan diidentifikasi dengan mengikuti berbagai pemangku kepentingan yang didukung *HCV Toolkits* dari negara yang bersangkutan, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal;
  - c. setiap serat yang dipanen dengan melanggar undang-undang, aturan dan peraturan yang berlaku, atau
  - d. setiap serat dari daerah dimana masyarakat lokal dan masyarakat adat belum memberikan persetujuan bebas, diberikan sebelumnya, dan diinformasikan, kepada APRIL dan kegiatan para pemasok kayunya;
  - e. di samping itu, sesuai dengan komitmen ini akan diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen, yang dapat diterima baik oleh APRIL maupun masyarakat sipil termasuk *Eyes on the Forest*. Semua misi verifikasi dapat dikawal oleh anggota masyarakat sipil termasuk *Eyes on the Forest*. Sampai verifikasi tersebut tersedia, APRIL tidak akan menerima pasokan serat dari hutan alam manapun.
- 3) APRIL akan memberikan masyarakat sipil termasuk *Eyes on Forest* akses menuju konsesi dan pabrik pemasoknya untuk memantau dan memverifikasi baik secara langsung maupun jarak jauh semua komitmen setiap saat dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk
  - a. depot kayu untuk memeriksa, antara lain, keberadaan serat hutan alam;
  - b. ruang udara untuk memfoto dan rekaman video depot kayu, dan pembukaan gambut dan kegiatan penebangan hutan; dan
  - c. dokumen untuk memverifikasi, antara lain, asal pengiriman.
- 4) APRIL akan membuat rekening wasiat yang dikelola oleh pihak ketiga yang independen, yang dapat diterima oleh APRIL dan masyarakat sipil termasuk *Eyes on the Forest* untuk membayar semua kegiatan pemantauan yang berhubungan dengan komitmennya.
- 5) APRIL akan menjalani prosedur formal untuk dapat mendapatkan lagi "kontrol kayu" FSC, dan mengikuti semua standar yang diperlukan dikurangi aturan tahun 1994.
- 6) APRIL akan memberikan kompensasi untuk semua hutan alam/HCVF yang ditebang setelah tahun 2009 yang melanggar komitmennya untuk 100% bebas dari serat hutan alam. Kompensasi akan diberikan dengan melindungi blok hutan alam dengan ukuran yang sama di lanskap penting yang bukan milik APRIL dan para pemasok kayunya. Lanskap yang cocok akan diidentifikasi oleh anggota masyarakat sipil termasuk *Eyes on the Forest*.

## Rekomendasi *Eyes on the Forest* kepada pembeli dan mitra usaha APRIL lainnya

Eyes on the Forest memperingatkan para pembeli dan stakeholder lainnya untuk tidak terjebak oleh kampanye *greenwashing* APRIL termasuk apa yang disebut sebagai konsep pembangunan yang mentransformasikan gambut.

Sampai penilaian pemantauan masyarakat sipil yang independen, dan transparan mengkonfirmasi bahwa SMG/APP telah mengambil tindakan di atas dengan cara yang memuaskan, *Eyes on the Forest* menyerukan kepada perusahaan untuk memutuskan semua hubungan dengan APRIL dan entitas bisnis terasosiasi mereka.

Demi melindungi hutan Indonesia, Eyes on the Forest merekomendasikan untuk tidak mendukung APRIL melanjutkan penebangan hutan dengan pembelian produk mereka atau hubungan bisnis lainnya. Pejabat pemerintah saat ini sedang di penjara karena praktek korupsi pada saat mengeluarkan izin penebangan hutan untuk perusahaan-perusahaan yang berasosiasi dengan APRIL<sup>77</sup>.

HABIS

*Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:  
Editor *Eyes on the Forest*  
Email: [editor\(at\)eyesontheforest.or.id](mailto:editor@eyesontheforest.or.id)*

## Lampiran 1. Kronologi Konflik Sosial

- Pada tanggal 20 Juni 2009, delapan hari setelah keputusan kontroversial 2009 dikeluarkan untuk PT. RAPP, warga Teluk Meranti dan Teluk Binjai melayangkan surat kepada perusahaan menyampaikan bahwa mereka menolak kegiatan perusahaan di Kampar<sup>78</sup>.
- Pada tanggal 27 Oktober 2009, LSM lokal dan nasional mengeluarkan pernyataan bersama yang berisi penolakan terhadap penebangan hutan PT. RAPP di Kampar yang terjadi pada hak masyarakat atas tanah untuk mengelola tanah dan hutan milik leluhur mereka<sup>79, 80</sup>.
- Pada tanggal 22 Desember 2009, WALHI Riau menerbitkan sebuah laporan investigasi atas penebangan hutan PT. SRL di Pulau Rangsang dan aksi protes keras dari masyarakat di 13 desa setempat<sup>81</sup>.
- Pada Juli 2010, 14 LSM mengajukan gugatan hukum terhadap Menteri Kehutanan terkait dengan izin yang diberikan kepada PT. RAPP di Semenanjung Kampar di Pengadilan Negeri Pelalawan<sup>82</sup>.
- Pada bulan Agustus 2010, warga desa Teluk Meranti mengajukan petisi kepada pemerintah Kabupaten dan DPRD Pelalawan untuk menghentikan penebangan hutan alam dan mencabut izin pemasok APRIL. Setidaknya 150 warga desa Teluk Meranti bersama dengan perwakilan LSM memprotes kegiatan PT. RAPP di Kantor Bupati Pelalawan dan DPRD.<sup>83</sup>
- Pada saat yang sama 429 warga Teluk Meranti mengirim petisi resmi kepada perusahaan yang secara resmi menolak perjanjian yang disebut oleh perusahaan sebagai "forum perwakilan masyarakat", dengan alasan bahwa mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, dan bahwa perjanjian tersebut merugikan masyarakat dan menghilangkan hak-hak penduduk desa atas kepemilikan hutan Kampar.<sup>84</sup>
- Pada Februari 2011, sebuah koalisi LSM yang disebut "koalisi Anti-Perusakan Hutan" Riau menghimbau pemerintah Indonesia untuk menghentikan kegiatan penebangan hutan alam dengan mencabut semua izin yang dikeluarkan untuk para pemasok kayu APRIL termasuk PT. RAPP dan PT. SRL<sup>85</sup>.
- Pada bulan Agustus 2011, ABC News Australia melaporkan konflik sosial sehubungan dengan kegiatan PT. RAPP di Kampar dan Pulau Padang.<sup>86</sup>
- Pada 26 Oktober 2011, masyarakat Teluk Meranti, yang diwakili oleh Kantor Bantuan Hukum Riau (KBH) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, mengajukan gugatan warga negara terhadap Menteri Kehutanan, Bupati Pelalawan dan PT. RAPP di Pengadilan Negeri Pelalawan<sup>87</sup>.
- Pada bulan November 2011, warga Pulau Rupa membakar beberapa alat berat dan kamp pekerja sebagai aksi protes atas kegiatan penebangan hutan oleh PT. SRL di pulau tersebut<sup>88</sup>.
- Pada bulan November 2011, warga Pulau Padang berbondong-bondong menuju ke kompleks DPRD di Pekanbaru untuk mendesak Dewan Legislatif (DPRD) Riau untuk membantu menghentikan kegiatan PT. RAPP di pulau atas sengketa lahan dan masalah lingkungan<sup>89</sup>.
- Pada Januari 2012, warga Pulau Padang menjahit mulut mereka di Jakarta sebagai aksi

protes terhadap kegiatan PT. RAPP di lahan tradisional mereka, setelah berminggu-minggu melakukan aksi protes di Jakarta, mereka meyakinkan Kementerian Kehutanan untuk menangguhkan sementara kegiatan penebangan oleh PT. RAPP di pulau tersebut. Serta membentuk tim mediasi untuk menelaah kasus<sup>90, 91, 92, 93, 94, 95, 96</sup>. Organisasi masyarakat sipil di provinsi Riau meluncurkan pernyataan bersama yang menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk meninjau keputusan menteri SK 327 tahun 2009 yang merupakan dasar bagi konsesi PT. RAPP di Pulau Padang konsesi, yang meliputi 37% dari permukaan pulau (110.000 hektar)<sup>97, 98</sup>.

- Pada bulan Maret 2012, kelompok-kelompok masyarakat sipil di Provinsi Riau mengutuk kekerasan yang ditunjukkan oleh PT. RAPP yang membubarkan aksi protes sengketa tanah masyarakat Gunung Sahilan, dengan aksi kekerasan pada tanggal 6 Maret dengan memukul sepeda motor dan menyerang penduduk setempat<sup>99</sup>.
- Pada bulan Maret 2012, penduduk desa Teluk Meranti memplester mulut mereka dengan lakban hitam di depan Pengadilan Negeri Pelalawan selama persidangan kasus<sup>100</sup>.
- Pada bulan Maret 2012, EoF dan media lokal menemukan PT. SRL di Pulau Rupert menebang habis pohon Ramin dan perusahaan masih menebang habis hutan di tengah konflik dengan masyarakat di mana mediator menghimbau perusahaan untuk menghentikan kegiatan karena sedang dilakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa.<sup>101</sup>
- Pada bulan April, 2012, Zainuri Hasyim dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Bagian Riau mengatakan bahwa PT. SRL telah melanggar aturan dan pedoman dalam mengelola kegiatan di konsesi mereka. Berdasarkan temuan tersebut, sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (PK-PHPL) yang diperoleh oleh PT SRL pada tahun 2011 dapat dicabut oleh Departemen Kehutanan yang harus mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan.<sup>102</sup>
- Pada bulan Mei 2012, warga Teluk Binjai yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan PT. RAPP memulai aksi protes mereka terhadap perusahaan dengan menyatakan bahwa perusahaan telah mengingkari janjinya untuk menyediakan 6.000 hektar "perkebunan tanaman hidup".<sup>103</sup>
- Pada bulan Juni 2012, Jikalahari mengecam Bupati Pelalawan karena mengabaikan usulan masyarakat untuk mengelola hutan komunal di Semenanjung Kampar dan mengkritik sikap pilih kasih atas proyek "Restorasi Ekosistem", proyek "*greenwashing*" APRIL.<sup>104</sup>
- Pada tanggal 29 Juni 2012, koalisi yang disebut "Koalisi Pendukung Perjuangan Rakyat Kepulauan Meranti" mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan konflik kehutanan di Pulau Padang khususnya untuk mencegah tindakan ekstrim lebih lanjut yang dilakukan oleh warga. Koalisi menghimbau Presiden untuk menangguhkan izin PT. RAPP di pulau tersebut. Para anggota koalisi adalah Walhi Riau, Serikat Tani Rakyat, PRD Riau, Jaringan Masyarakat Gambut Riau, Jikalahari, *Greenpeace*, Kabut, TII Riau, *Scale Up*, Rumah Pohon).<sup>105</sup>
- Pada bulan Juli 2012, masyarakat Pulau Padang menyampaikan surat kepada Presiden Indonesia yang mendesak beliau untuk menghentikan kegiatan PT. RAPP<sup>106</sup>.
- Pada akhir September 2012, sebuah tim pencari fakta yang dibentuk oleh dewan penasihat Presiden SBY mengunjungi Pulau Padang untuk menemukan penyimpangan dalam perizinan. Sedangkan, tim untuk Kerentanan Gambut yang didirikan oleh Departemen Kehutanan kemungkinan terpecah karena adanya perbedaan pandangan dalam melaksanakan penelitian. Sedangkan, tim batas/delineasi dari APRIL dan lembaga pemerintah (BKPH) telah selesai melakukan survei mereka dan akan melaporkannya kepada Menteri. Tim pencari fakta kerentanan lahan gambut diprotes oleh LSM karena mereka mengatakan bahwa tim tidak bisa melakukan survei karena APRIL belum melakukan kegiatan di pulau<sup>107, 108</sup>.

## Referensi

- <sup>1</sup> <http://www.aprilasia.com/>
- <sup>2</sup> <http://www.rgei.com/> dan <http://www.sukantotanoto.net/index.php>
- <sup>3</sup> ABC News (2 Agustus 2011) Foreign Correspondent– Paper/Tiger. <http://www.abc.net.au/foreign/content/2011/s3283804.htm>
- <sup>4</sup> Situs web APRIL, “Kegiatan”. Diperiksa pada tanggal 4 September 2012 [http://www.aprilasia.com/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=33&Itemid=59](http://www.aprilasia.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=33&Itemid=59)
- <sup>5</sup> <http://www.paperone.com/>
- <sup>6</sup> *Friends of the Earth* (Februari 2002) *Paper tiger, hidden dragons 2: APRIL fools*. [http://www.foe.co.uk/resource/reports/april\\_fools.pdf](http://www.foe.co.uk/resource/reports/april_fools.pdf)
- <sup>7</sup> *Greenpeace* (13 November 2009) *Paper giant pulls out of Indonesia rainforest destruction. Signal to world leaders to end global deforestation*. <http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/paper-giant-pulls-out-of-indon/>
- <sup>8</sup> ABC News (2 Agustus 2011)
- <sup>9</sup> Nine News (4 Agustus 2011) *Fuji Xerox cuts ties with logging company*. <http://news.ninensn.com.au/national/8281546/fuji-xerox-cuts-ties-with-logging-company>
- <sup>10</sup> Lihat laporan yang dipublikasikan di: <http://www.eyesontheforest.or.id>, <http://www.greenpeace.org>,
- <sup>11</sup> APRIL (2005) *2004 Sustainability Report. Moving Forward*. [http://www.aprilasia.com/pdfs/sreport\\_yr2004.pdf](http://www.aprilasia.com/pdfs/sreport_yr2004.pdf)
- <sup>12</sup> *Eyes on the Forest* (8 Juli 2010) *Business as Usual in Riau, Sumatra: Pulp Industry Continues Clearance of Natural Forest*. [http://www.eyesontheforest.or.id/attach/EoF\\_Report\\_July2010\\_pulp\\_industry\\_continues\\_clearance%20B.pdf](http://www.eyesontheforest.or.id/attach/EoF_Report_July2010_pulp_industry_continues_clearance%20B.pdf)
- <sup>13</sup> *Eyes on the Forest* (30 November 2010) *EoF calls on SMG/APP and APRIL to keep their promises: Stop conversion of natural forest and drainage of peat to produce pulp, stop violation of the country's climate commitments*. <http://www.eyesontheforest.or.id/attach/EoF%20%2830Nov10%29%20Riau%20RKT%202010%20natural%20forest%20and%20peat%20conversion%20EN%20FINAL.pdf>
- <sup>14</sup> WWF Indonesia (5 Desember 2010) *WWF Position on APRIL*. <http://www.wwf.or.id/en/?21280/WWF-position-on-APRIL>
- <sup>15</sup> *Eyes on the Forest* (8 Juli 2010)
- <sup>16</sup> *Eyes on the Forest* (30 November 2010)
- <sup>17</sup> IWGFF (2012) Can expansion of the pulp and paper industries in Indonesia be achieved sustainably?
- <sup>18</sup> For the latest example, see: RISI (19 October 2012) APRIL disputes RAN's statement on its relations with Disney, invites Disney reps to review its forest management practices. <http://www.risiinfo.com/technologyarchives/environment/APRIL-invites-Disneys-representatives-to-review-first-hand-sustainable-forest-management-practices.html>
- <sup>19</sup> Merdeka.com (12 Juni 2012) Petani jahit mulut sendiri dengan jarum kain. <http://www.merdeka.com/peristiwa/petani-jahit-mulut-sendiri-dengan-jarum-kain.html>
- <sup>20</sup> Kementerian Kehutanan (2009) Data Perusahaan IUPHHK-HTI Tahun 2009. [http://www.dephut.go.id/files/IUPHHK\\_HT\\_2009.pdf](http://www.dephut.go.id/files/IUPHHK_HT_2009.pdf)
- <sup>21</sup> *Intervention by H.E. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono President of the Republic of Indonesia on Climate Change, speech at the G-20 Leaders Summit, 25 September 2009, Pittsburgh, PA, USA*. <http://forestclimatecenter.org/files/2009-09-25%20Intervention%20by%20President%20SBY%20on%20Climate%20Change%20at%20the%20G-20%20Leaders%20Summit.pdf>
- <sup>22</sup> WWF Indonesia (2010) *Sumatra's Forests, their Wildlife and the Climate. Windows in Time: 1985, 1990,*

2000 and 2009.

[http://awsassets.wwf.or.id/downloads/wwf\\_indonesia\\_2010\\_sumatran\\_forests\\_wildlife\\_climate\\_report\\_f\\_or\\_dkn\\_bappenas.pdf](http://awsassets.wwf.or.id/downloads/wwf_indonesia_2010_sumatran_forests_wildlife_climate_report_f_or_dkn_bappenas.pdf)

<sup>23</sup> Sanderson, E., J. Forrest, C. Loucks, J. Ginsberg, E. Dinerstein, J. Seidensticker, P. Leimgruber, M. Songer, A. Heydlauff, T. O'Brien, G. Bryja, S. Klenzendorf dan E. Wikramanayake. 2006. *Setting Priorities for the Conservation and Recovery of Wild Tigers: 2005-2015. The Technical Assessment*. WCS, WWF, Smithsonian, and NFWF-STF, New York – Washington, D.C. <http://www.worldwildlife.org/tigers/pubs/TCL-technical.pdf>

<sup>24</sup> Zieren, M., Wim Giesen, Yus Rusila Noor dan Marcel J. Silvius. 1994. *Proposed Wetland Conservation Areas: New & Extensions of Existing Reserves*. AWB-Indonesia/PHPA. Bogor.

<sup>25</sup> BirdLife Indonesia (2003). Daerah Penting bagi Burung Sumatera. BirdLife Indonesia, Bogor.

<sup>26</sup> Jikalahari & Jonotero (2005) *Summary of the findings. Survey of Forest Quality, Flora & Fauna, and Peat Soils in Kampar Peninsula and Padang Island Forest Areas, Riau, Sumatra*. [http://www.maanystavat.fi/april/expansion/Jikalahari\\_summary.pdf](http://www.maanystavat.fi/april/expansion/Jikalahari_summary.pdf)

<sup>27</sup> *Eyes on the Forest* (11 Desember 2007) *Local govts, Jikalahari agree to conserve Kampar peat forest*. <http://www.eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=152>

<sup>28</sup> Jikalahari (20 Desember 2005) Usulan Taman Nasional Semenanjung Kampar <http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Jikalahari%2020Dec2005%20Usulan%20Taman%20Nasional%20Semenanjung%20Kampar.pdf>

<sup>29</sup> WWF (14 Februari 2006) *Expansion of Kuala Kampar Conservation Areas - 14 Feb 2006* [http://www.eyesontheforest.or.id/attach/WWF\\_14Feb2006\\_Expansion\\_of\\_Kuala\\_Kampar\\_Conservation\\_Areas\\_20121012101014.pdf](http://www.eyesontheforest.or.id/attach/WWF_14Feb2006_Expansion_of_Kuala_Kampar_Conservation_Areas_20121012101014.pdf)

<sup>30</sup> *Eyes on the Forest* (27 Mei 2005) *News: APRIL's New Road Threatens Natural Forest in Kampar Peninsula*. <http://www.eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=11>

<sup>31</sup> *Anti Forest-Mafia Coalition of NGOs* (4 Mei 2012) *APP, APRIL and Corruption – Buyers Beware!* [http://www.eyesontheforest.or.id/attach/KLAKH%20\(04May12\)%20Factsheet%20APP%20APRIL%20and%20Corruption\\_FINAL\\_20120525080524.pdf](http://www.eyesontheforest.or.id/attach/KLAKH%20(04May12)%20Factsheet%20APP%20APRIL%20and%20Corruption_FINAL_20120525080524.pdf)

<sup>32</sup> *Anti Forest-Mafia Coalition of NGOs* (4 May 2012)

<sup>33</sup> *Eyes on the Forest* (25 October 2012) *Ex forestry service imprisoned to 2.5 year for graft case*. <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=582>

<sup>34</sup> *Anti Forest-Mafia Coalition of NGOs* (4 Mei 2012)

<sup>35</sup> *Eyes on the Forest* (22 Desember 2009) *WALHI releases Investigative Report on APRIL forest clearing* <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=258>

<sup>36</sup> *Eyes on the Forest* (Agustus 2009) *Legally Questionable Forest Clearing by APRIL, Threatens Peat Swamp Forest of Kerumutan, Critical for Sumatran Tigers, Local People and the Global Climate*. [http://eyesontheforest.or.id/attach/EoF\\_Investigative\\_Report%20May\\_June2009\\_FINAL.pdf](http://eyesontheforest.or.id/attach/EoF_Investigative_Report%20May_June2009_FINAL.pdf)

<sup>37</sup> *Eyes on the Forest* (28 November 2011) *PT. Sumatera Riang Lestari, a timber company affiliated to APRIL, clearcut natural forest in small island Pulau Rupa Riau Province, in 2011 amid conflict with community*. [http://eyesontheforest.or.id/attach/EoF\\_Investigative\\_Report\\_%28Nov2011%29\\_PT\\_SRL\\_Blok\\_Rupa\\_APRILgroup.pdf](http://eyesontheforest.or.id/attach/EoF_Investigative_Report_%28Nov2011%29_PT_SRL_Blok_Rupa_APRILgroup.pdf)

<sup>38</sup> *Eyes on the Forest* (Feb 2011) *PT Sumatera Riang Lestari, affiliated company to APRIL, clear-cuts natural forests in Rupa Island, eliminates endangered Ramin habitat, threatens indigenous Suku Akit and degrades peat ecosystem in the small island*. [http://eyesontheforest.or.id/attach/EoF\\_Inv\\_Report\\_PT\\_SRL\\_Feb2011\\_eng\\_FINAL.pdf](http://eyesontheforest.or.id/attach/EoF_Inv_Report_PT_SRL_Feb2011_eng_FINAL.pdf)

<sup>39</sup> *Eyes on the Forest* (11 Oktober 2012) *APRIL supplier's environmental document could be fake: official*. <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=571>

<sup>40</sup> Kementerian Kehutanan (17 Juni 2011) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK/323/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan

Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perumbahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain.  
[http://appgis.dephut.go.id/appgis/moratorium/SK\\_323\\_MENHUT.pdf](http://appgis.dephut.go.id/appgis/moratorium/SK_323_MENHUT.pdf)

<sup>41</sup> Kementerian Kehutanan Indeks Peta Indikatif Penundaan Izin.  
<http://appgis.dephut.go.id/appgis/petamoratorium.html>

<sup>42</sup> Majalah TEMPO (22 April 2012) *Going After The Big 14*.

<sup>43</sup> *Eyes on the Forest* (25 April 2012) *Ministry to sue 14 timber companies by civil case*  
[www.eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=538](http://www.eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=538)

<sup>44</sup> PT. Sarbi International Certification (12 May 2011) Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).  
<http://ebookbrowse.com/pt-sumatera-ri-ri-sarbi-pdf-d152745911>

<sup>45</sup> Walhi (3 Oktober 2011) PT.Sumatera Riang Lestari Terbukti Melakukan Praktek Buruk Dalam Operasi HTI-Nya.  
<http://www.walhi.or.id/v2.0/id/ruang-media/siaran-pers/1481-ptsumatera-riang-lestari-terbukti-melakukan-praktek-buruk-dalam-operasi-hti-nya.html>

<sup>46</sup> PT. Sarbi International Certification (13 June 2011) Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).  
[http://www.dephut.go.id/files/HasilAuditPHPLSumateraRiangLestari\\_062011.pdf](http://www.dephut.go.id/files/HasilAuditPHPLSumateraRiangLestari_062011.pdf)

<sup>47</sup> Hasyim, Z. & H. Setiawan (2011) Pengalaman Pemantauan Sertifikasi PK-PHPL dalam Skema SVLK untuk PT Sumatera Riang Lestari di Provinsi Riau.  
<http://www.slideshare.net/ZainuriHasyim/pengalaman-pemantauan-pt-srl-riau-final>

<sup>48</sup> Riau Terkini (22 Desember 2009) Investigasi WALHI, Kegiatan PT. SRL Berpotensi Tenggelamkan Pulau Rangsang. <http://www.riauterkini.com/lingkungan.php?arr=27262>

<sup>49</sup> Komunikasi pribadi.

50

<sup>51</sup> Riaustrust.com (5 Januari 2012) Bupati Serahkan SK Penghentian Operasional RAPP.  
<http://riaustrust.com/read-966--bupati-serahkan-sk-penghentian-operasional-rapp.html>

<sup>52</sup> *Intervention by H.E. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono President of the Republic of Indonesia on Climate Change, speech at the G-20 Leaders Summit, 25 September 2009, Pittsburgh, PA, USA.*  
<http://forestclimatecenter.org/files/2009-09-25%20Intervention%20by%20President%20SBY%20on%20Climate%20Change%20at%20the%20G-20%20Leaders%20Summit.pdf>

<sup>53</sup> Kantor Perdana Menteri Norwegia (26 Mei 2010) *Norway and Indonesia in partnership to reduce emissions from deforestation.*  
<http://www.regjeringen.no/en/dep/smk/press-center/Press-releases/2010/Norway-and-Indonesia-in-partnership-to-reduce-emissions-from-deforestation.html?id=605709>

<sup>54</sup> *Letter of Intent between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Indonesia on "Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation."* [http://www.regjeringen.no/upload/SMK/Vedlegg/2010/Indonesia\\_avtale.pdf](http://www.regjeringen.no/upload/SMK/Vedlegg/2010/Indonesia_avtale.pdf)

<sup>55</sup> WWF Indonesia (2008)

<sup>56</sup> Rieley, J.O. & S.E. Page (2008) *Carbon Budgets under Different Land Uses on Tropical Peatland*. Dimuat dalam: Rieley, J.O., Banks, C.J. dan Page, S.E. (2008) *Future of Tropical Peatlands in Southeast Asia as Carbon Pools and Sinks*. Makalah yang Dipresentasikan pada Sesi Khusus mengenai Lahan Gambut Tropis pada Kongres Gambut Internasional ke-13, Tullamore, Irlandia, 10 Juni 2008, *CARBOPEAT Partnership, International Peat Society and University of Leicester*, United Kingdom.  
[http://www.geog.le.ac.uk/carbopeat/media/pdf/tullamorepapers/ipc\\_tropical\\_peat\\_special\\_session.pdf](http://www.geog.le.ac.uk/carbopeat/media/pdf/tullamorepapers/ipc_tropical_peat_special_session.pdf)

<sup>57</sup> Hooijer, A., Page, S., Jauhiainen, J., Lee, W. A., Lu, X. X., Idris, A., dan Anshari, G.: *Subsidence and carbon loss in drained tropical peatlands*, *Biogeosciences*, 9, 1053-1071, doi:10.5194/bg-9-1053-2012, 2012. <http://www.biogeosciences.net/9/1053/2012/bg-9-1053-2012.html>

<sup>58</sup> Jauhiainen, J., Hooijer, A. & S.E. Page (2012) *Carbon dioxide emissions from an Acacia plantation on*

peatland in Sumatra, Indonesia. *Biogeosciences*, 9, 617-630. doi:10.5194/bg-9-617-2012, 2012. <http://www.biogeosciences.net/9/617/2012/bg-9-617-2012.html>

<sup>59</sup> WWF Indonesia (2010)

<sup>60</sup> Anggota *World Business Council for Sustainable Development*.  
<http://www.wbcsd.org/about/members.aspx>

<sup>61</sup> APRIL's "Fact Sheet (November 2007)" menyatakan: "From 2005, APRIL has publicly adopted a High Conservation Value Forests (HCVF) commitment through its Environmental, Social, Health and Safety (ESHS) Policy and Code of Best Practice (CoBP). This requires the Company to "conduct third party auditable High Conservation Value (HCV) assessment before development in all new concessions, in order to manage High Conservation Value Forests (HCVF)."

<sup>62</sup> Konsep HCVF pertama kali dikembangkan oleh *Forest Stewardship Council (FSC)* pada tahun 1999 sebagai "Prinsip ke-9nya: Memelihara Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value Forests*)" untuk memastikan bahwa Nilai Konservasi Tinggi terlindungi, Prinsip ke-9 FSC menyatakan bahwa: "Aktivitas manajemen pada hutan bernilai konservasi tinggi harus selalu dianggap dalam konteks pendekatan pencegahan." Dalam prakteknya, hal ini berarti bahwa tidak ada hutan yang ditebang tanpa penilaian awal terhadap Nilai Konservasi Tinggi pada hutan dan lanskap di sekitarnya dikombinasikan dengan identifikasi langkah yang dibutuhkan untuk memelihara dan meningkatkan nilai-nilai tersebut.

<sup>63</sup> APRIL's "Fact Sheet (November 2007)" menyatakan: "APRIL conducts HCV assessment using the Indonesian HCVF Toolkit, developed by Rainforest Alliance and ProForest in 2003, and based on the 1999 Forest Stewardship Council (FSC) concept. The HCV assessments are then peer-reviewed by internationally recognized institutions such as ProForest UK and WWF Indonesia which also conduct their separate HCV assessment within the concessions of APRIL or its partners."

<sup>64</sup> Sebagai contoh, lihat WWF Indonesia (5 Desember 2010) dan berbagai laporan yang diposting di <http://www.eyesontheforest.or.id>

<sup>65</sup> Sebagai contoh, penebangan HCVF oleh PT. Mitra Kembang Selaras di Kerumutan dilaporkan oleh EoF (Juli 2010)

<sup>66</sup> Surat *Rainforest Alliance SmartWood Program* kepada APRIL, tertanggal 15 Agustus 2008. Tersedia pada *Rainforest Alliance* atas permintaan, silakan menghubungi Richard Z. Donovan, *Vice President of Forestry* di [rdonovan@ra.org](mailto:rdonovan@ra.org).

<sup>67</sup> *Rainforest Action Network* (15 April 2010) *Indonesian Paper giant APRIL's Certification Status Suspended*.  
<http://ran.org/indonesian-paper-giant-april%E2%80%99s-certification-status-suspended>

<sup>68</sup> WWF-Indonesia (5 Desember 2010)

<sup>69</sup> Dalam surat RA tertanggal 6 April 2010, RA/SW memberikan dua tenggat waktu bagi APRIL untuk menginisiasi ulang Kayu Terkontrol dan aktivitas pengauditan HCVF: (1) "APRIL must, within 10 days from the date of this letter including secondary or degraded forest in peat forest areas, and demonstrate to RA/SW auditors that this commitment is being met, based on field observations and interactions with other stakeholders" (16 April 2010) (2) "APRIL demonstrates that it has met the 10 Major CARs included in our most recent auditing report and within 90 days from the date of this letter" (4 Juli 2010) Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Richard Z. Donovan, *Vice President of Forestry* di: [rdonovan@ra.org](mailto:rdonovan@ra.org).

<sup>70</sup> APRIL (2011) *2010 Sustainability Report. Building a Sustainable Future*.  
<http://www.aprilasia.com/images/pdfs/APRIL%20SR.pdf>

<sup>71</sup> *Tropenbos HCV Full Assessment of the Kampar Peninsula BICC-6 May 2010*. Konsultasi publik, 6 Mei 2010.

<sup>72</sup> Surat terbuka dari *Forest Peoples Programme* dan *Scale Up* kepada APRIL, 20 Mei 2010.  
<http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/05/indonesiaaprilfpplettermay10eng.pdf>

<sup>73</sup> Jikalahari dan *Greenpeace* (6 Mei 2010) Surat Terbuka kepada APRIL.  
<http://www.eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=279>

<sup>74</sup> Konsorsium untuk merevisi *HCV Toolkit* untuk Indonesia (Juni 2008) *Toolkit for Identification of High Conservation Values in Indonesia*.  
<http://www.hcvnetwork.org/resources/national-hcv-interpretations/HCV%20Toolkit%20for%20Indonesia-E>

[ngversion-final.pdf](#)

<sup>75</sup> WWF Indonesia (2010)

<sup>76</sup> *Eyes on the Forest-Google Earth Sumatra Database* (<http://maps.eyesontheforest.or.id/>)

<sup>77</sup> Anti Forest-Mafia Coalition of NGOs (4 May 2012)

<sup>78</sup> Made Ali (18 Maret 2012) Gugatan Citizen Law Suit Warga Teluk Meranti.

<http://madealikade.wordpress.com/2012/03/18/gugatan-citizen-law-suit-warga-teluk-meranti-pelalawan/>

<sup>79</sup> Riau Terkini (27 Oktober 2009) Pengelolaan Kawasan Hutan, Kelangan LSM Riau Dukung Masyarakat Teluk Meranti. <http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=26537>

<sup>80</sup> *Eyes on the Forest* (28 Oktober 2009) *Environmentalists back up Kampar Peninsula community.*

<http://www.eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=246>

<sup>81</sup> WALHI Riau (22 Desember 2009) *WALHI releases Investigative Report on APRIL forest clearing.*

<http://eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=258>

<sup>82</sup> Kompas (26 Juli 2010) Soal Kampar, 14 LSM Somasi Menteri Kehutanan.

<http://cetak.kompas.com/read/2010/07/26/04420768/soal.kampar.14.lsm.somasi.menteri.kehutanan>

<http://scaleup.or.id/pub-koran-260710.html>

<sup>83</sup> *Eyes on the Forest* (25 Agustus 2010) *Community urge logging moratorium in Kampar Peninsula.*

<http://www.eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=296>

<sup>84</sup> *Eyes on the Forest* (25 Agustus 2010)

<sup>85</sup> Walhi (1 Februari 2011) Cabut Izin HTI PT.RAPP, Selamatkan Hutan Gambut Riau.

<http://www.walhi.or.id/v2.0/id/ruang-media/pernyataan-sikap/268-cabut-izin-hti-pt-rapp-selamatkan-hutan-gambut-riau.html>

<sup>86</sup> ABC News (2 Agustus 2011) Koresponden Luar Negeri – Kertas/Harimau.

<http://www.abc.net.au/foreign/content/2011/s3283804.htm>

<sup>87</sup> <http://riacorruptiontrial.wordpress.com/category/semenanjung-kampar/>

<sup>88</sup> *Eyes on the Forest* (November 2011) *PT Sumatera Riang Lestari, a timber company affiliated to APRIL, clearcut natural forest in small island Pulau Rupa, Riau Province, in 2011 amid conflict with community.*

[http://www.eyesontheforest.or.id/attach/EoF\\_Investigative\\_Report\\_%28Nov2011%29\\_PT\\_SRL\\_Blok\\_Rupa\\_t\\_APRILgroup.pdf](http://www.eyesontheforest.or.id/attach/EoF_Investigative_Report_%28Nov2011%29_PT_SRL_Blok_Rupa_t_APRILgroup.pdf)

<sup>89</sup> *Eyes on the Forest* (16 Nov 2011) *Pulau Padang residents lodge complaint on APRIL's PT RAPP.*

<http://www.eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=500>

<sup>90</sup> *Tribunnews* (20 Desember 2011) Tim Medis Aksi Jahit Mulut: Obatnya Cuma Cabut SK Menteri.

<http://www.tribunnews.com/2011/12/20/tim-medis-aksi-jahit-mulut-obatnya-cuma-cabut-sk-menteri>

<sup>91</sup> *The Jakarta Globe* (20 Desember 2011) *Extreme Protest Spreads Against Riau Andalan Pulp and Paper.*

<http://www.thejakartaglobe.com/home/extreme-protest-spreads-against-riau-andalan-pulp-and-paper/485892>

<sup>92</sup> *The Jakarta Globe* (23 Desember 2011) *Starving Sewed-Mouth Protesters Get Medical Care.*

<http://www.thejakartaglobe.com/news/starving-sewed-mouth-protesters-get-medical-care/486707>

<sup>93</sup> *Eyes on the Forest* (6 Januari 2012) *APRIL operation halted in small island, "mediation team" deployed.*

<http://www.eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=512>

<sup>94</sup> *Mongabay.com* (9 Januari 2012) *Extreme mouth-sewing protest in Indonesia leads to logging inquiry.*

[http://news.mongabay.com/2012/0109-hance\\_protests\\_rapp\\_inquiry.html#](http://news.mongabay.com/2012/0109-hance_protests_rapp_inquiry.html#)

<sup>95</sup> *Greenomics* (4 Januari 2012) *APRIL must refrain from pulping peatland forest on a small Indonesian island.*

[http://www.greenomics.org/docs/Report\\_201201\\_Feedback\\_to\\_April\\_response.pdf](http://www.greenomics.org/docs/Report_201201_Feedback_to_April_response.pdf)

<sup>96</sup> *Greenomics* (16 Januari 2012) *Greenomics Indonesia's Feedback to the APRIL Response of 13 January 2012.*

[http://www.greenomics.org/docs/Report\\_201201\\_Feedback\\_to\\_April\\_response.pdf](http://www.greenomics.org/docs/Report_201201_Feedback_to_April_response.pdf)

<sup>97</sup> *Eyes on the Forest* (19 Januari 2012) *Controversial SK 327 permit should be revised, civil groups say.*

<http://www.eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=513>

- <sup>98</sup> Jikalauhari (7 Januari 2012) Pernyataan Bersama ORNOP Riau tentang Kasus Pulau Padang  
[http://www.jikalauhari.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=170%3Apernyataan-bersama-ornop-tentang-kasus-pulau-padang&catid=39%3Ajikalauhari-news&Itemid=134&lang=id](http://www.jikalauhari.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=170%3Apernyataan-bersama-ornop-tentang-kasus-pulau-padang&catid=39%3Ajikalauhari-news&Itemid=134&lang=id)
- <sup>99</sup> *Eyes on the Forest* (16 Mar 2012) *NGOs blast APRIL for violence.*  
<http://www.eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=523>
- <sup>100</sup> Rumahpohon.org, *Disappointment and courage of Teluk Meranti People*, 25 Maret 2012.  
<http://rumahpohon.org/#>
- <sup>101</sup> *Eyes on the Forest* (5 April 2012) *APRIL supplier PT SRL still fells Ramin in Rupat Island.*  
<http://www.eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=532>
- <sup>102</sup> *Eyes on the Forest* (5 Apr 2012)
- <sup>103</sup> Gurindam12.com (16 Mei 2012) Ratusan Massa Kembali Tagih Janji RAPP,  
<http://www.gurindam12.com/2012/05/ratusan-massa-kembali-tagih-janji-rapp.html>
- <sup>104</sup> *Eyes on the Forest* (25 Juni 2012) *Jikalauhari denounces District Head for preference on village forest.*  
<http://www.eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=557>
- <sup>105</sup> Jikalauhari (1 Juli 2012) Presiden Harus Bertindak Selesaikan Kasus Pulau Padang.  
[http://jikalauhari.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=193:presiden-harus-bertindak-selesaikan-kasus-pulau-padang&catid=38:community&Itemid=133&lang=en](http://jikalauhari.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=193:presiden-harus-bertindak-selesaikan-kasus-pulau-padang&catid=38:community&Itemid=133&lang=en)
- <sup>106</sup> *Eyes on the Forest* (6 Juli 2012) *APRIL concessions protested by communities, one dies at APP site.*  
<http://www.eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=559>
- <sup>107</sup> katakabar.com (17 September 2012) Utusan Wantimpres: Banyak Pelanggaran di Pulau Padang,  
<http://www.katakabar.com/kabar-lingkungan/kabar-lingkungan/5170-utusan-wantimpres-banyak-pelanggaran-di-pulau-padang>
- <sup>108</sup> Riau Terkini (3 September 2012) Pusat Bentuk Tim Monitoring Konflik Pulau Padang.  
<http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=50471>

###